

REPUBLIK INDONESIA

Advertorial

RAPBN 2021

Percepatan
Pemulihan Ekonomi
dan Penguatan Reformasi



Advertorial

RAPBN 2021

Percepatan
Pemulihan Ekonomi
dan Penguatan Reformasi

Disusun oleh

Tim Kementerian Keuangan

Editor:

Direktorat Penyusunan APBN

Direktorat Jenderal Anggaran

Gedung Sutikno Slamet Lantai 12

Jalan Dr Wahidin Raya No.1

www.anggaran.kemenkeu.go.id



SEKILAS RAPBN 2021

Perekonomian global dan domestik di tahun 2021 diproyeksikan membaik meskipun diliputi ketidakpastian yang tinggi. Diharapkan ketersediaan vaksin akan menambah keyakinan masyarakat dan dunia usaha dalam mempercepat pemulihan ekonomi

Pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan *countercyclical* di tahun 2021 melalui RAPBN yang ekspansif-konsolidatif untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan memperkuat reformasi struktural.

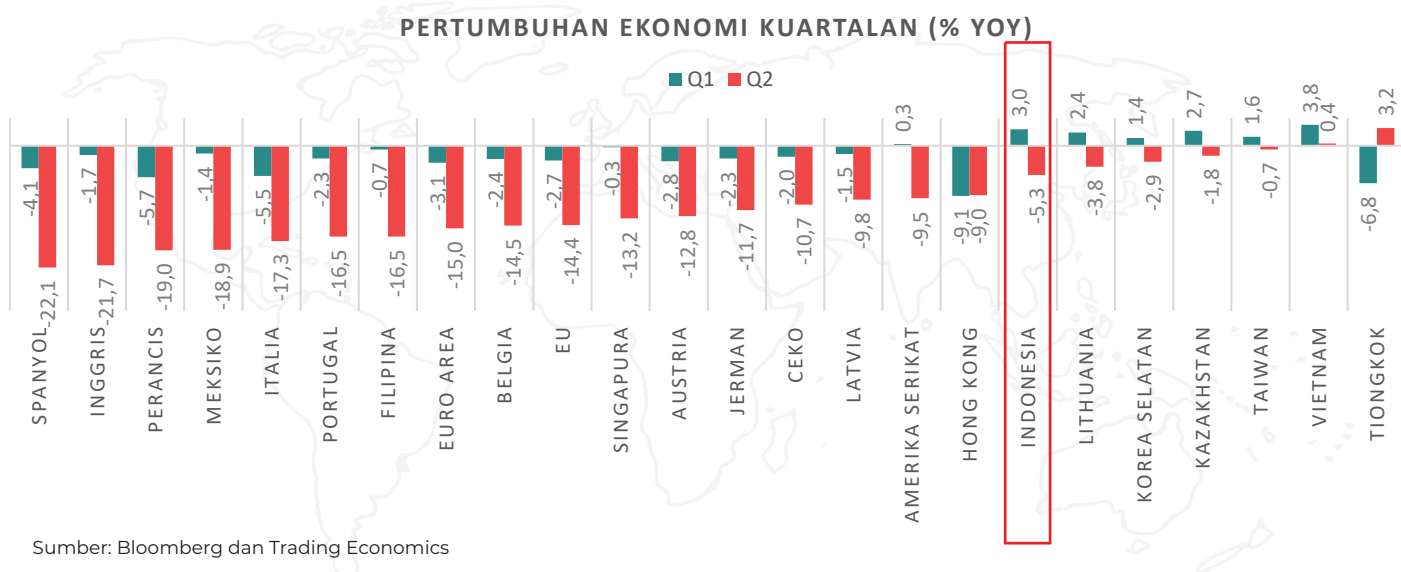
RAPBN tahun 2021 akan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Prioritas pembangunan nasional akan difokuskan pada bidang Kesehatan, Pendidikan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ketahanan Pangan, Perlindungan Sosial, Infrastruktur, dan Pariwisata.



Tekanan Covid-19 Menyebabkan Perekonomian Dunia Mengalami Kontraksi

Terutama pada triwulan kedua tahun 2020



Sumber: Bloomberg dan Trading Economics

Pertumbuhan ekonomi Q2-2020 terkontraksi di sebagian besar perekonomian dunia, akibat dari kebijakan restriksi ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kontraksi terdalam dialami negara-negara dengan restriksi yang lebih ketat, serta memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor tertentu seperti ekspor dan pariwisata.

Terdapat deviasi antara proyeksi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Menunjukkan ketidakpastian yang tinggi serta sulitnya melakukan proyeksi di masa pandemi.



IMF

2020 2021

Jan	3,3	3,4
Apr	-3,0	5,8
Jun	-4,9	5,4



World Bank

2020 2021

Jan	2,5	2,6
Jun	-5,2	4,2



OECD

2020 2021

Mar	2,4	3,3
Jun	-7,6 s.d -6,4	2,8 s.d 5,2

Pemulihan Ekonomi Dunia diperkirakan mulai terjadi di tahun 2021
faktor ketersediaan vaksin akan menentukan langkah dan pola pemulihan

Tahun 2021 menjadi momentum penting

bagi pemulihan ekonomi nasional sekaligus memperkuat reformasi dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju 2045



Pemulihan Ekonomi dampak pandemi Covid-19

Mempercepat *recovery* dunia usaha yang terdampak pandemi Covid-19

Melanjutkan penanganan pemulihan kesehatan dan perlindungan sosial dampak pandemi Covid-19



Melanjutkan Reformasi

Menjaga keberlanjutan reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka menengah – panjang



Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Meningkatkan daya saing ekonomi dengan mendorong peningkatan kapasitas inovasi dan adaptasi teknologi



Akselerasi Transformasi Ekonomi

Mempercepat transformasi industri manufaktur

Mendorong Produk Manufaktur Indonesia dengan produk berteknologi tinggi



Pemanfaatan Kondisi Demografi

Peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pertumbuhan dalam jangka pendek



Keluar dari *Middle Income Trap*

Bertahap keluar dari *middle income trap* dengan perbaikan produktivitas, peningkatan daya saing dan kualitas SDM – Tenaga Kerja

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan kembali menuju *trajectory* jangka menengah, nilai tukar relatif menguat dan harga minyak diperkirakan meningkat



**Pertumbuhan
Ekonomi (%)**

4,5 - 5,5

(1,1) - 0,2



Inflasi (%)

3,0

2,0 - 4,0

- Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 cenderung bergerak ke bawah, akibat perkembangan Covid-19 yang tidak pasti



**Nilai Tukar
Rupiah (Rp/USD)**

14.600

14.400-14.800



**Tingkat Bunga^{*)}
SBN 10 Tahun (%)**

7,29

**Tingkat Bunga
SPN 3 Bulan (%)**

3,0 - 4,0

- Ekonomi Indonesia 2021 diproyeksi tumbuh 4,5% - 5,5% dengan mempertimbangkan faktor vaksin Covid-19, reformasi struktural, dan dukungan ekspansi fiskal

- Perkembangan inflasi akan dipengaruhi kekuatan pemulihan permintaan dan daya beli masyarakat. Penambahan likuiditas di masyarakat dapat mendorong naiknya permintaan. Ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi menjadi faktor kunci stabilitas harga dan mendukung ketahanan pangan



**Harga Minyak
(US\$/barel)**

45

35 - 40



**Lifting Minyak
(ribu barel/hari)**

705

705

- Kondisi global di tahun 2021 diperkirakan membaik, namun volatilitas di sektor keuangan global masih tetap perlu diwaspadai. Pemulihan ekonomi domestik di 2021 akan semakin menarik arus modal masuk dan memperkuat Rupiah



**Lifting Gas
(ribu barel setara
minyak/hari)**

1.007

992

■ RAPBN 2021
■ Outlook 2020

^{*)} Suku Bunga SBN 10 Tahun menggantikan Suku Bunga SPN 3 Bulan di tahun 2021



RAPBN 2021

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

Pendapatan Negara untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan target yang terukur dan insentif yang terarah

Belanja Negara fokus pada dukungan Program Prioritas Pembangunan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

(971,2)
Δ (1.039,2)

Pembiayaan anggaran sebagai alat fiskal Pemerintah untuk mendukung kebijakan ekspansif konsolidatif

triliun Rupiah

1.776,4
Δ 1.699,9

2.747,5
Δ 2.739,2

Rasio defisit thd PDB tahun 2021 menunjukkan arah ekspansif konsolidatif dalam mendukung akselerasi recovery ekonomi

971,2
Δ 1.039,2

Pendapatan Negara

Belanja Negara

Defisit Anggaran

Pembiayaan Anggaran

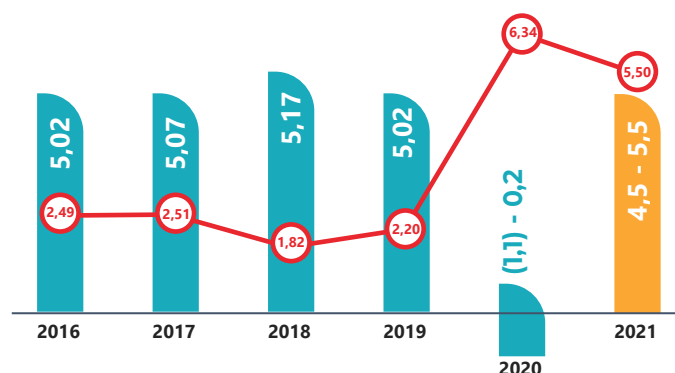
Perpres 72/2020

Defisit RAPBN 2021 pada kisaran 5,50% PDB dalam rangka mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

“ Dengan tingginya ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19, dibutuhkan kebijakan *countercyclical* yang kuat untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional ”

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Defisit (% terhadap PDB)



• Pandemi Covid-19 masih menimbulkan ketidakpastian, arah ekonomi global/domestik diproyeksikan membaik namun risiko ketidakpastian masih tinggi

• Tahun 2021 dukungan pemulihan ekonomi akan tetap dilanjutkan, ekspansi fiskal dibutuhkan untuk membiayai pemulihan ekonomi sekaligus penguatan reformasi

Pendapatan Negara

• Perpajakan	1.481,9	Δ 1.404,5
• PNBP	293,5	Δ 294,1
• Hibah	0,9	Δ 1,3

Belanja Negara

• Belanja Pemerintah Pusat	1.951,3	Δ 1.975,2
• Transfer ke Daerah dan Dana Desa	796,3	Δ 763,9

Pembiayaan Anggaran

• Pembiayaan Utang	1.142,5	Δ 1.220,5
• Pembiayaan Investasi	(169,1)	Δ (257,1)

RAPBN 2021
(triliun Rupiah)

Perpres 72/2020
(triliun Rupiah)

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2021

Tema

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

Menjaga dan mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional

- ▲ Melanjutkan dan menuntaskan penanganan Covid-19
- ▲ Pemulihan ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi domestik

Penguatan Reformasi Struktural

- ▲ Peningkatan iklim investasi, mendorong inovasi dan daya saing (*competitiveness*).
- ▲ Perbaikan kualitas SDM dan peningkatan produktivitas melalui reformasi bidang pendidikan, pelatihan vokasi, penelitian, reformasi bidang kesehatan, dan reformasi perlindungan sosial.

Reformasi APBN

- ▲ Meliputi bidang Penerimaan Perpajakan dan PNBPN, reformasi belanja dan TKDD
- ▲ Meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas
- ▲ Menjaga kesehatan dan sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah-panjang.

▲ Prioritas Pembangunan Nasional

Mengakselerasi pembangunan dengan prioritas bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial untuk mendorong tercapainya sasaran pembangunan tahun 2021

APBN Menjadi Instrumen Utama dalam Penanganan Dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021

Kebijakan PEN dilanjutkan di tahun 2021 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia

2021: Rp25,40 T^{*)}
2020: Rp87,55 T

Kesehatan

- Pengadaan vaksin Covid-19
- Imunisasi, Sarpras, Lab, Litbang
- Cadangan Bantuan Iuran BPJS utk PBU/BP

*)Sebagian besar dana PEN (Rp24,3 T) diluar Pagu Kemkes Rp84,3 T, Belanja Pusat Kesehatan Lainnya Rp22,2 T dan TKDD Kesehatan Rp39,0 T

2021: Rp20,40 T
2020: Rp120,61 T

Insentif Usaha

- Pajak DTP
- Pembebasan PPh 22 Impor
- Percepatan Pengembalian Pendahuluan PPN

2021: Rp14,9 T
2020: Rp53,57 T

Pembiayaan Korporasi

- PMN kpd Lembaga penjaminan (LPEI)
- PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan (HK, ITDC, Pelindo III, KIW)
- Penjaminan *backstop loss limit*

2021: Rp110,2 T
2020: Rp203,9 T

Perlindungan Sosial

- PKH 10 jt KPM
- Kartu Sembako 18,8 juta KPM @200 ribu
- Pra Kerja-> vokasi *offline & online*
- Dana Desa --> BLT Desa dan mendukung BUMDes
- Bantuan Sosial Tunai 10 Juta KPM @200 ribu selama 6 bulan

2021: Rp136,7 T
2020: Rp106,11 T

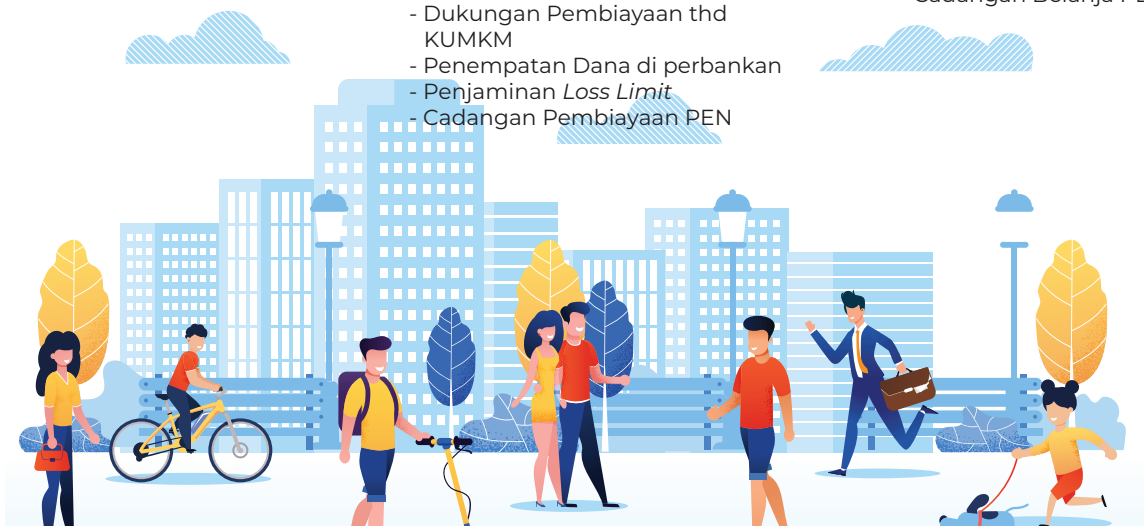
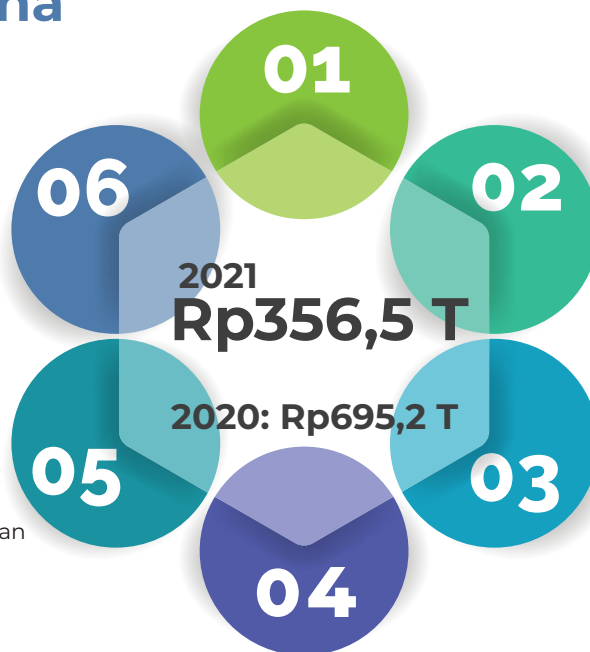
Sektoral K/L & Pemda

- Dukungan Pariwisata
- Ketahanan Pangan
- Pengembangan ICT
- Pinjaman ke daerah
- Padat Karya K/L
- Kawasan Industri
- Cadangan Belanja PEN

2021: Rp48,8 T
2020: Rp123,46 T

UMKM

- Subsidi bunga KUR reguler
- Dukungan Pembiayaan thd KUMKM
- Penempatan Dana di perbankan
- Penjaminan *Loss Limit*
- Cadangan Pembiayaan PEN

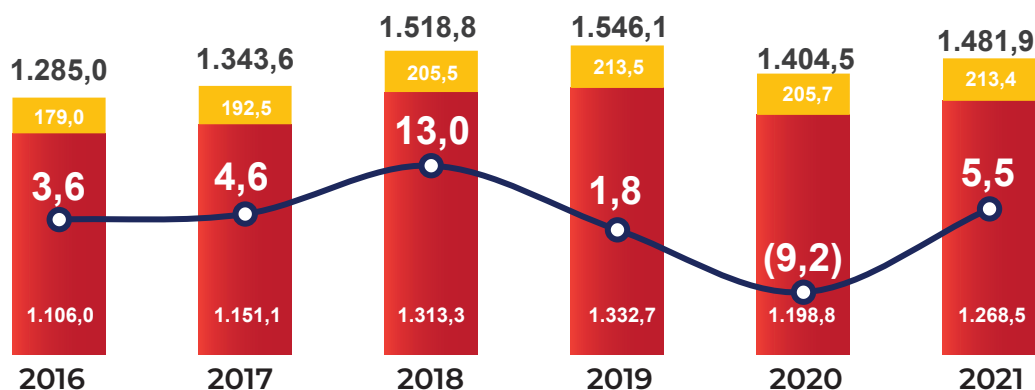


Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan di masa pemulihan tahun 2021 diproyeksikan tumbuh optimal 5,5% dengan fokus kebijakan mendukung pemulihan ekonomi dan melanjutkan reformasi

Penerimaan Perpajakan (triliun Rupiah)

■ Pajak
■ Bea Cukai
● Growth (%)



Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Transformasi

Pemberian insentif perpajakan yang selektif dan terukur

Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Penguatan sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi

Kebijakan Optimalisasi dan Reformasi Perpajakan

Pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)

Ekstensifikasi dan pengawasan berbasis individu dan kewilayahan

Pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berbasis risiko dan berkeadilan

Meneruskan reformasi perpajakan yang meliputi bidang organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak

Pengembangan fasilitas kepabeanan dan harmonisasi fasilitas fiskal lintas K/L



Penerimaan Pajak

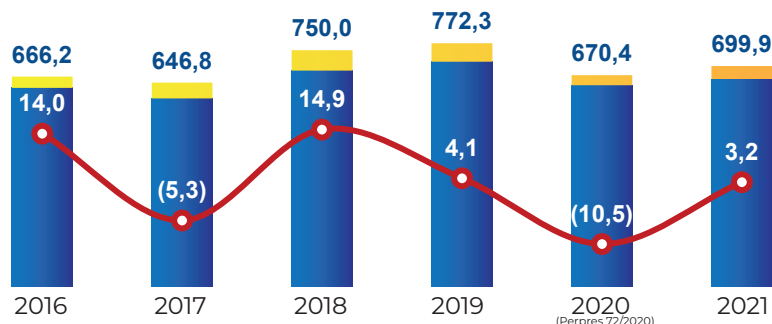
didukung oleh penerimaan PPh dan PPN yang diproyeksikan meningkat mengikuti prospek membaiknya aktivitas ekonomi

Pajak Penghasilan

(triliun Rupiah)

- PPh Migas
- PPh Nonmigas
- Growth PPh Nonmigas (%)

PPh Non migas diproyeksikan tumbuh 3,2% dengan memperhatikan sektor ekonomi penyumbang pajak utama belum sepenuhnya *recovery* dampak pandemi Covid-19

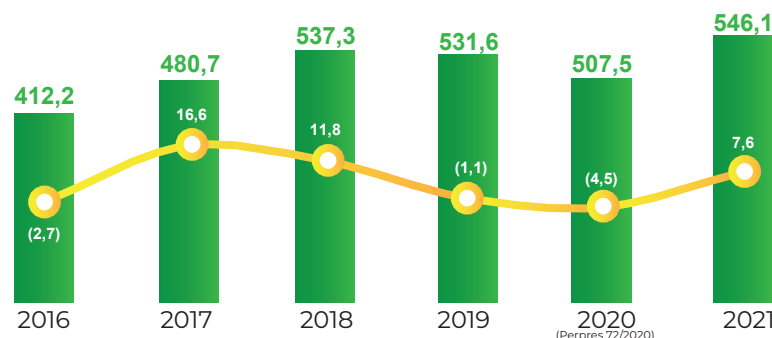


Pajak Pertambahan Nilai

(triliun Rupiah)

- PPN
- Growth PPN (%)

Peningkatan kinerja penerimaan PPN yang tumbuh 7,6% sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi



Insentif Pajak

sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan transformasi ekonomi

1 Percepatan Pengembalian Pendahuluan PPN

Membantu *cashflow* perusahaan untuk kembali melakukan aktifitas usaha

2 Insentif PPh 22 Impor

Dalam rangka memenuhi impor kebutuhan bahan baku produksi untuk sektor-sektor yang masih terdampak Covid-19

3 Pajak Ditanggung Pemerintah

Mendukung daya saing dan keekonomian sektor tertentu

4 Tax Holiday dan Tax Allowance

Menarik penanaman modal untuk meningkatkan investasi di dalam negeri dalam rangka mendorong diversifikasi ekonomi, membuka lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan wilayah



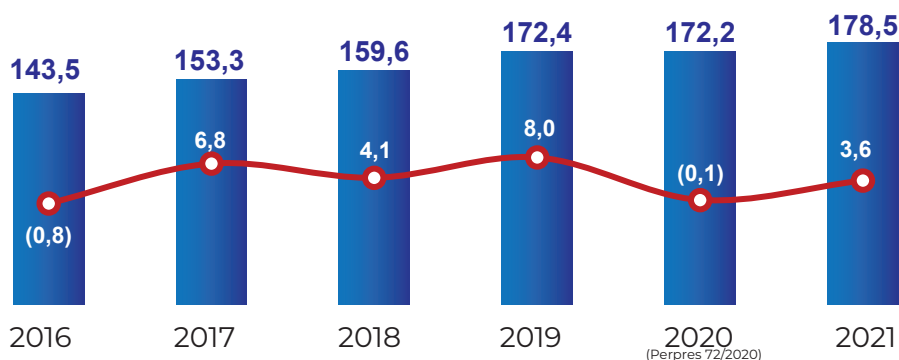
Kepabaeenan dan Cukai

meningkat seiring dengan perluasan basis cukai dan perbaikan perdagangan Internasional di tahun 2021

Cukai

(triliun Rupiah)

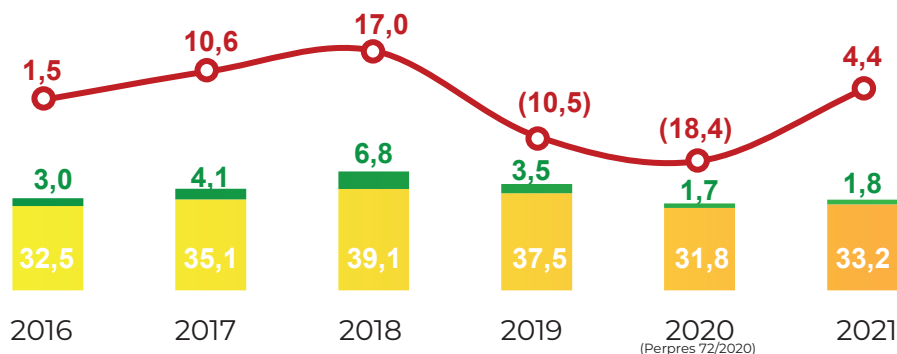
■ Cukai
● Growth Cukai (%)



Pajak Perdagangan Internasional

(triliun Rupiah)

■ Bea Keluar
■ Bea Masuk
● Growth Pajak Perdagangan Internasional (%)



Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional

Insentif kepabaeenan terutama untuk kemudahan ekspor dan impor memenuhi kebutuhan bahan baku lokal dan relaksasi bagi Kawasan Berikat (KB) & KITE

Dukungan Transformasi Ekonomi

Penyempurnaan Sistem *National Logistics Ecosystem* (NLE) dengan target a.l:

- Menurunkan biaya logistik
- Menurunkan waktu logistik dari 111 jam menjadi 55,8 jam
- Peringkat *Trading Across Border* (TAB) dalam EODB naik dari 116 ke 87

Reformasi untuk optimalisasi penerimaan

Pengembangan sistem pengawasan cukai terintegrasi (*excise connection*).

Pemberantasan dan menurunkan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal



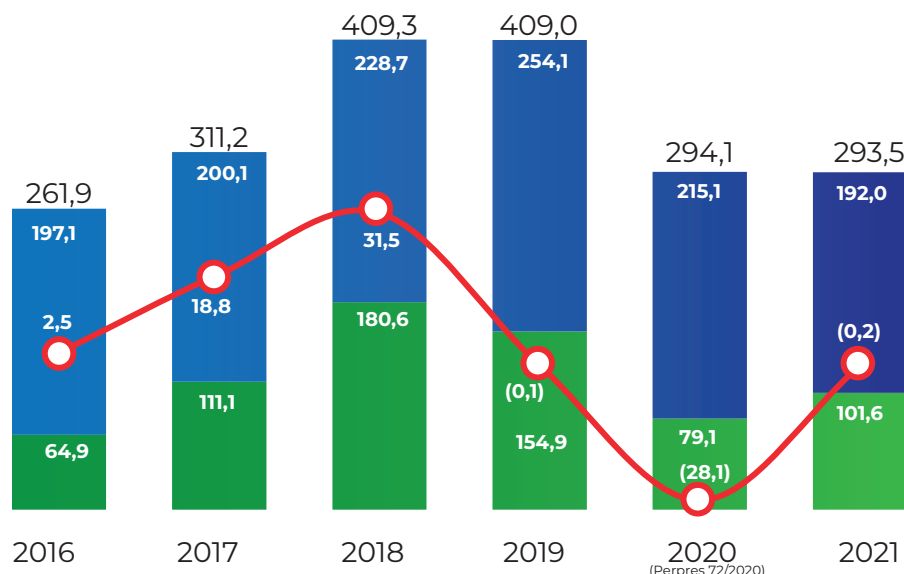
Penerimaan Negara Bukan Pajak

didukung oleh prospek meningkatnya harga komoditas utama dunia terutama minyak bumi serta optimalisasi penerimaan dari pelayanan PNBP Kementerian/Lembaga dan BLU sejalan dengan membaiknya aktivitas masyarakat

PNBP

(triliun Rupiah)

- PNBP SDA
- PNBP Non SDA
- Growth PNBP (%)



■ 2021 ■ 2020
(triliun Rupiah)

SDA Migas

■ 72,4
■ 53,3

SDA NonMigas

■ 29,1
■ 25,8

Kekayaan Negara Dipisahkan

■ 26,1
■ 65,0

PNBP Lainnya

■ 107,0
■ 100,1

Pendapatan BLU

■ 58,8
■ 50,0

PNBP Sumber Daya Alam (SDA) dari Migas mengikuti pergerakan harga dan *lifting* minyak dan gas bumi sementara PNBP SDA Nonmigas terutama akan dipengaruhi harga dan produksi Batu Bara.

Penerimaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dari dividen BUMN mengalami penurunan dengan mempertimbangkan dampak Covid-19 pada pelemahan kinerja BUMN

Langkah optimalisasi *lifting* migas dilakukan antara lain melalui peningkatan iklim investasi sektor migas dan mengendalikan *Cost Recovery*

Pelayanan PNBP KL pada tahun 2021 diharapkan akan lebih optimal seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi

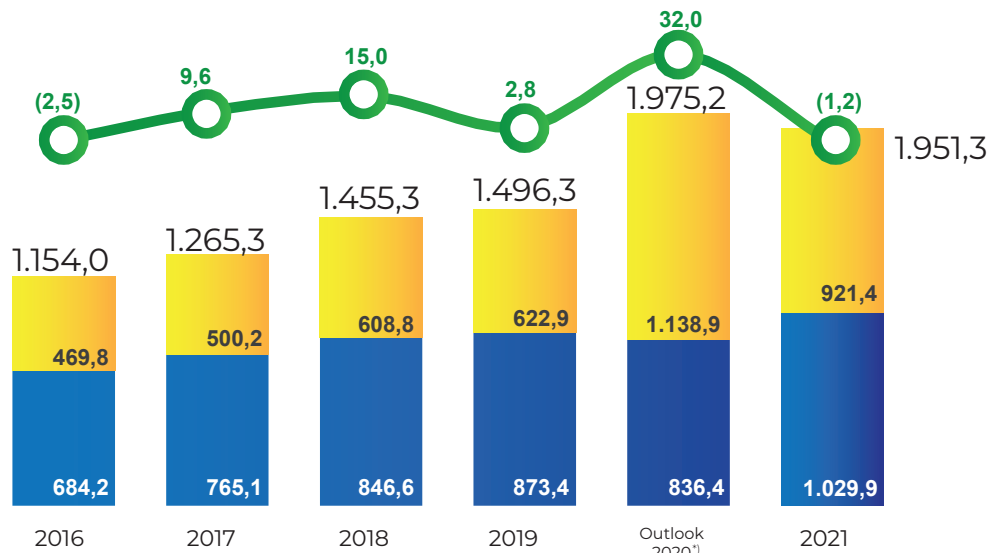


Belanja Pemerintah Pusat

Percepatan Pemulihan Sosial - Ekonomi dan Penguatan Reformasi
untuk menuju Indonesia Maju

Belanja Pemerintah Pusat

■ Belanja K/L
■ Belanja Non K/L
● Growth (%)



*) Perpres 72/2020

Fokus Belanja Pemerintah Pusat

Efisiensi belanja, melalui penajaman biaya operasional sejalan dengan perubahan proses kerja

Mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi

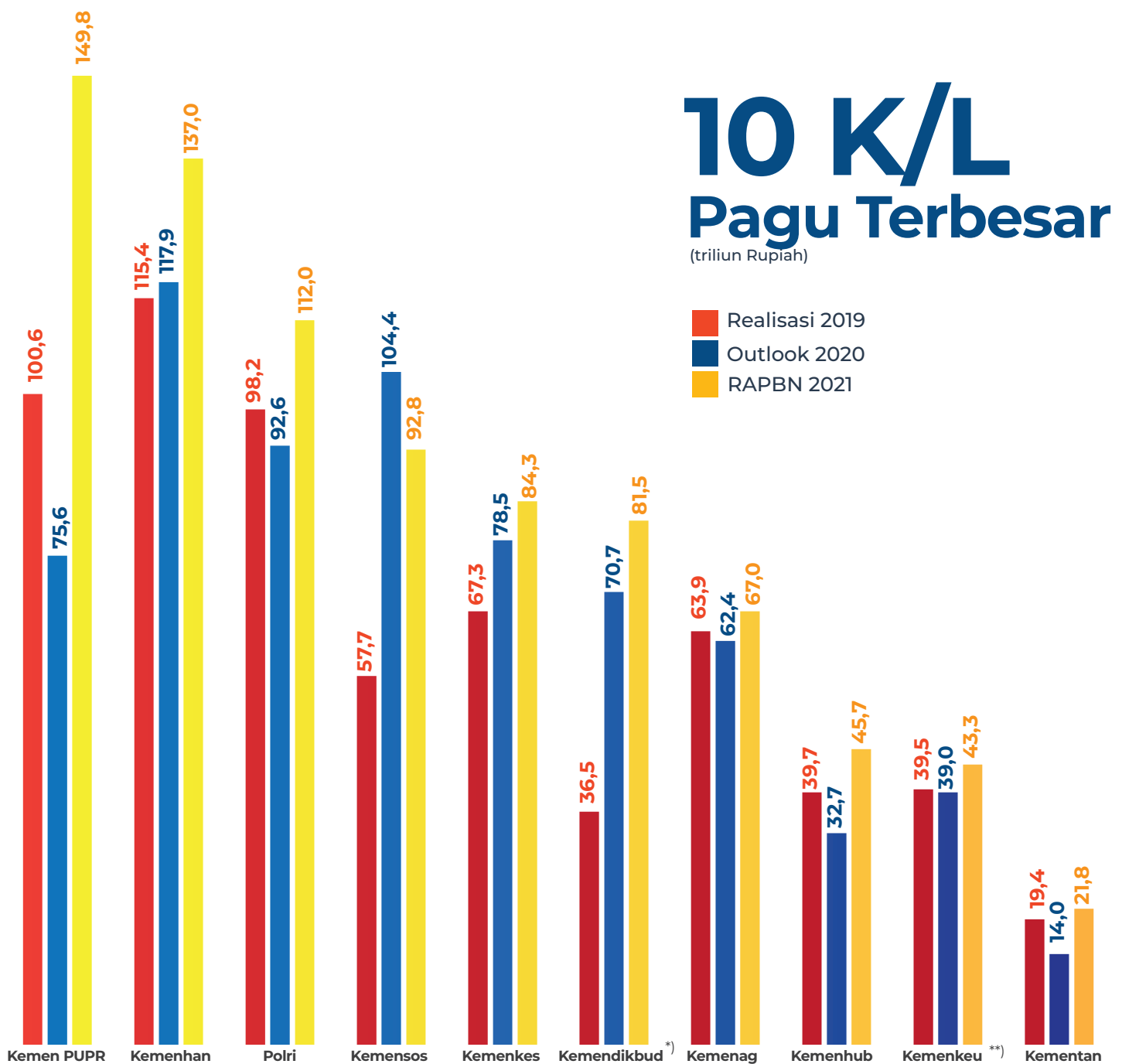
Optimalisasi Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan (*service delivery*)

Redesign Sistem Penganggaran
Menggunakan pendekatan belanja yang lebih baik (*spending better*) yang fokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis pada hasil (*result based*), dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan (*automatic stabilizer*)



Belanja Kementerian/ Lembaga

diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan sosial-ekonomi dan penguatan reformasi



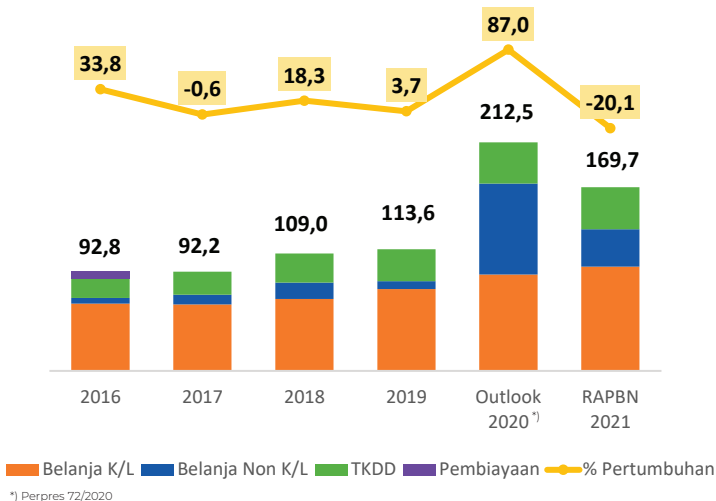
^{*)} pengalihan pendidikan tinggi dari Kemenristek ke Kemendikbud

^{**)} termasuk anggaran BLU di Kemenkeu (thn 2019: Rp13,8T; Thn 2020: Rp15,2T; Thn 2021: Rp8,5 T)
antara lain BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan LPDP

Anggaran Kesehatan

diarahkan untuk percepatan pemulihan kesehatan pasca pandemi, diikuti peningkatan akses dan mutu layanan melalui penguatan sistem kesehatan

(Triliun Rupiah)



Rencana Pencapaian Bidang Kesehatan

Rp48,8 T
Bantuan Iuran Peserta PBI JKN
96,8 juta jiwa

Rp2,4 T
Bantuan Iuran PBPU dan BP kelas III

Rp18,0 T
Antisipasi pengadaan Vaksin Covid-19 untuk
160 juta jiwa

Rp3,7 T
Antisipasi pelaksanaan Imunisasi untuk
160 juta jiwa

Rp2,8 T
Layanan Pengendalian Penyakit TB
145 layanan

Rp10,7 T
Bantuan Operasional Kesehatan
10.143 Puskesmas

Rp2,0 T
Bantuan Operasional KB
5.737 Balai Penyuluhan KB

Rp1,1 T
Penyediaan Makanan Tambahan bagi
238.000 Ibu Hamil Kurang Energi Kronis
441.000 Ribu Balita Kurus

Pembangunan/Rehabilitasi
559 RS Rujukan

Pembangunan Puskesmas
971 puskesmas

Prevalensi Stunting 21,1 persen
Perluasan Prioritas Intervensi pada
360 kota/kab

Kebijakan

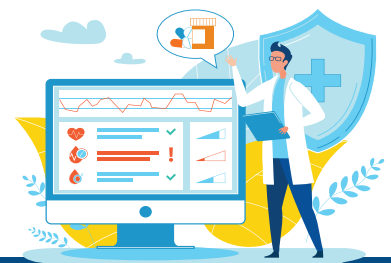
Percepatan pemulihan kesehatan akibat Covid-19 melalui peningkatan dan pemerataan *supply side*, penguatan koordinasi, dan antisipasi untuk pengadaan vaksin

Penguatan program early childhood melalui peningkatan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita, serta akselerasi penurunan *stunting*

Penguatan Sinergi dan Koordinasi Pusat dan Daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan untuk mendukung *supply side*, serta untuk memperkuat program promotif dan preventif

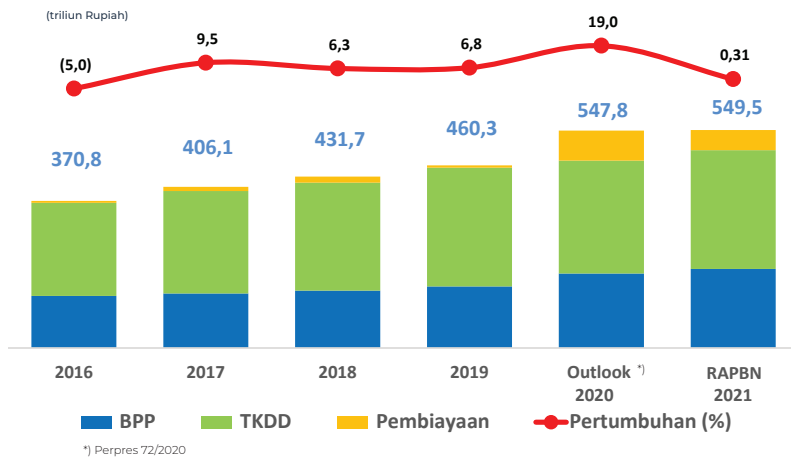
Reformasi JKN melalui perbaikan mutu layanan dan efektivitas biaya JKN, penyesuaian iuran JKN dan validitas data PBI JKN, serta penguatan peran Pemda

Health Security Preparedness melalui penguatan pencegahan, deteksi, dan respon penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi



Anggaran Pendidikan

diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan melalui penguatan penyelenggaraan PAUD dan peningkatan kompetensi guru sehingga skor PISA meningkat



RAPBN 2021
(triliun Rupiah)

Outlook 2020
(triliun Rupiah)

Melalui Belanja Pemerintah Pusat

■ 199,4 ● 187,9

Melalui Transfer ke Daerah

■ 299,1 ● 284,5

Melalui Pembiayaan

■ 51,0 ● 75,4

Rencana Pencapaian di bidang Pendidikan

■ 2021 ● 2020



Program Indonesia Pintar
(juta jiwa)

Kemendikbud

■ 17,9 ● 17,9

Kemenag

■ 2,2 ● 2,2



Beasiswa Bidik Misi/
KIP Kuliah
(ribu mahasiswa)

Kemendikbud

■ 1.095,1 ● 985,0

Kemenag

■ 52,6 ● 52,6



Bantuan Operasional Sekolah
(juta siswa)

TKDD

■ 46,8 ● 45,8

Kemenag

■ 8,9 ● 8,9



TPG Non PNS
(ribu guru)

Kemendikbud

■ 274,6 ● 274,6

Kemenag

■ 270,9 ● 270,9



Penerimaan Beasiswa LPDP
(mahasiswa)

Kemendikbud

■ 4.000 - 5.000

● 5.000

Reformasi Pendidikan

Transformasi kepemimpinan kepala sekolah

Transformasi Pendidikan dan pelatihan guru (transformasi PPG untuk menghasilkan generasi guru baru)

Mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa (menyederhanakan kurikulum --> lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi)

Standar Penilaian global

Kemitraan Daerah dan Masyarakat Sipil

Kebijakan Pendidikan Lainnya

Penguatan vokasi dan kartu prakerja (*link and match* dengan industri,serta penguatan R&D)

Penguatan penyelenggaraan PAUD (melalui BOP PAUD dan Dana Desa untuk PAUD di desa)

Peningkatan efektivitas penyaluran bantuan Pendidikan (BOS, PIP, dan LPDP)

Percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah 3T

Penajaman KIP Kuliah dan Pendanaan Pendidikan Tinggi



Pengembangan Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi

difokuskan untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi pada beberapa sektor guna mendukung dan meningkatkan kualitas serta delivery layanan kepada masyarakat

Program Strategis

Penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) sebanyak 5.053 lokasi

Penyediaan kapasitas satelit di 12.377 lokasi layanan publik

Pembangunan Pusat Data Nasional Literasi Digital, Transformasi Digital Sektor Strategis, *Digital Technopreneur*

Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pemutakhiran DTKS, perangkat IT dan Jaringan Komunikasi

Mendukung digitalisasi pendidikan seperti pengadaan alat TIK dan media pembelajaran



Total Anggaran Rp30,5 T

Belanja K/L

Kemen Kominfo

Kemensos

Kemenkeu

Kemen ATR/BPN

K/L Lainnya

Rp21,5 T

Rp14,7 T

Rp1,5 T

Rp2,1 T

Rp1,0 T

Rp2,2 T

TKDD

Rp9,0 T

Kebijakan

Akselerasi Transformasi Digital untuk penyelenggaraan pemerintahan;

Mewujudkan *public service delivery* yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan;

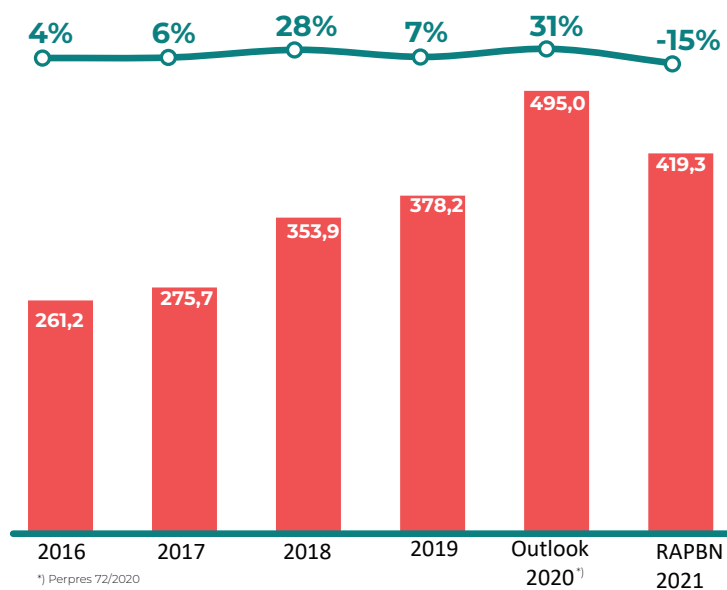
Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (*shared services*);

Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa/kelurahan 3T

Anggaran Perlindungan Sosial

Kebijakan Perlinsos 2021 untuk mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap

(triliun Rupiah)



Kebijakan

Melanjutkan Perlinsos untuk akselerasi pemulihan (a.l. Kartu Sembako, PKH, Bansos Tunai dan Kartu Pra kerja)

Mendorong program perlinsos yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi *aging population* (reformasi perlindungan sosial)

Integrasi Program Bansos dengan subsidi energi secara bertahap dan berhati-hati

Penyempurnaan DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlinsos, serta penguatan monev

Rencana Pencapaian di bidang Perlindungan Sosial

■ 2021 ● 2020



Cakupan KPM menerima Bantuan PKH

■ 10,0 juta penerima manfaat
● 10,0 juta penerima manfaat



Cakupan KPM menerima Bantuan Pangan

■ 18,8 juta penerima manfaat
● 20,0 juta penerima manfaat



Jumlah Siswa Menerima Bantuan PIP

■ 20,1 juta siswa
● 20,1 juta siswa



Jumlah Penduduk Peserta PBI JKN

■ 96,8 juta penduduk
● 96,8 juta penduduk



Jumlah KPM menerima Bansos Tunai

■ 10,0 juta penerima manfaat
● 9,0 juta penerima manfaat

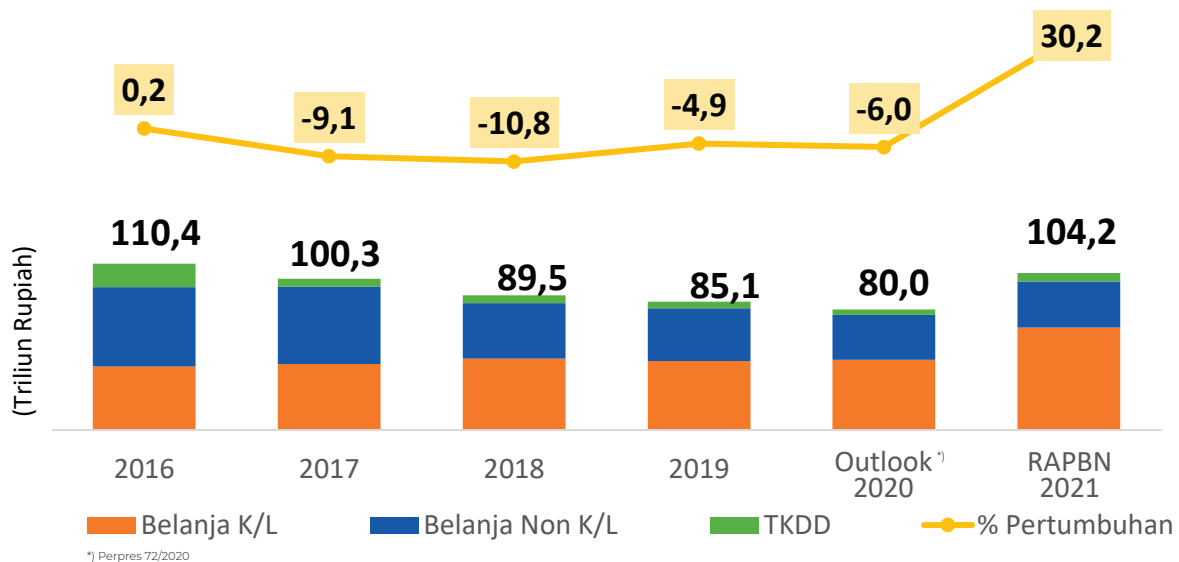


Jumlah Mahasiswa Memperoleh KIP Kuliah

■ 1,1 juta mahasiswa
● 1,0 juta mahasiswa

Anggaran Program Ketahanan Pangan

Program Ketahanan Pangan 2021 diarahkan peningkatan produksi pangan serta dukungan pemulihan ekonomi



Kebijakan

Mendorong Produksi Komoditas Pangan dengan membangun sarpras dan penggunaan teknologi

Revitalisasi Sistem Pangan Nasional antara lain dengan memperkuat korporasi petani/helayan dan distribusi pangan

Pengembangan *Food Estate* di Kalteng, Sumsel, dan Papua (Merauke) Untuk

Meningkatkan Produktivitas Pangan antara lain dengan pemberdayaan transmigrasi/petani eksisting dan investasi *small farming* pada lahan seluas 165.000 Ha

Rencana Pencapaian di bidang Ketahanan Pangan



Produksi Padi
(juta ton)
58,50

Produksi Jagung
(juta ton)
24,20

Produksi Kedelai
(juta ton)
0,42

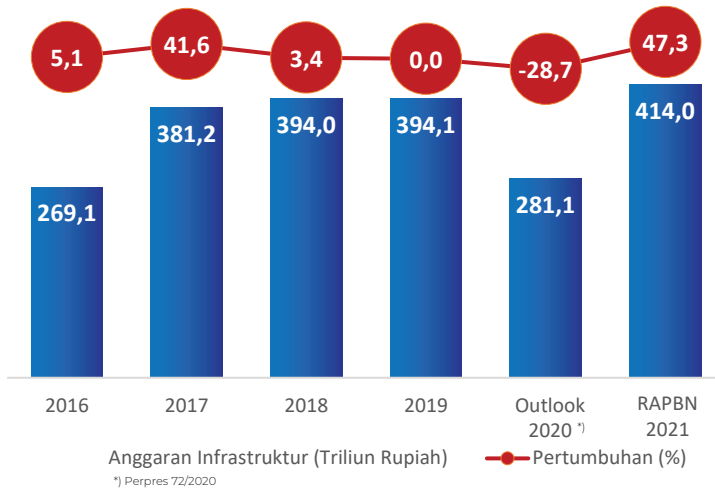
Produksi Daging
(juta ton)
0,44

Pembangunan Bendungan
43 unit on-going
4 unit baru

Peningkatan/Rehabilitasi
Irigasi
51.000 Ha

Anggaran Infrastruktur

diarahkan untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi



Total Anggaran

Rp414,0 T
2020: Rp281,1 T

■ 2021 ● 2020
(triliun Rupiah)

Pemerintah Pusat

■ 236,3 ● 140,1

TKDD

■ 131,9 ● 112,5

Pembiayaan

■ 45,8 ● 28,5

Kebijakan

Melanjutkan pembangunan infrastruktur pascapandemi Covid 19 melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas

Diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan industri dan pariwisata

Pembangunan sarana Kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pemukiman) untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional

Penyelesaian kegiatan prioritas 2020 yang tertunda

Rencana Pencapaian di bidang Infrastruktur

Pelayanan Dasar

 Rumah Susun & Rumah Khusus
11.650 unit

 Akses Sanitasi & Persampahan
1.037.010 KK

 Bendungan
47 unit (43 on going & 4 baru)

 Jaringan irigasi
20 ribu Ha

Konektivitas

 Pembangunan Jalan
678,0 km

 Jembatan
13,1 km

 Jalur KA
378 km/sp

 Bandara
10 unit

Energi dan Ketenagalistrikan

 Jaringan Gas Bumi utk Rumah Tangga
120.776 SR

 Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan
25 ribu unit

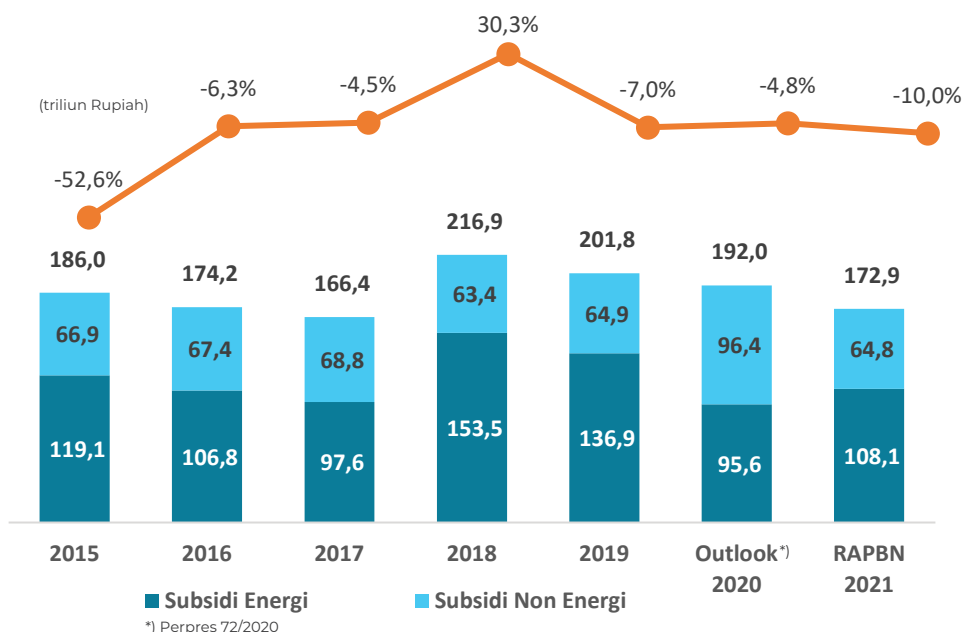
TI dan Informasi

 Penyediaan BTS di daerah 3 T di 5.053 lokasi

 Palapa Ring: Barat 40%; Tengah 30 %; Timur 30 %

Subsidi

diarahkan untuk lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan mendukung UMKM dan Koperasi



Subsidi Energi

Subsidi tetap solar Rp500/lt (2020: Rp1.000/lt)

Subsidi listrik Rumah Tangga diberikan kepada RT daya 450 VA dan 900 VA sesuai data DTKS

Volume Subsidi Energi:

LPG 3 Kg ---> 7,0 juta MT

Solar ---> 15,8 juta kiloliter

Minyak tanah ---> 0,5 juta kiloliter

Integrasi secara bertahap dan berhati-hati subsidi energi ke bantuan sosial melalui pengendalian volume

Subsidi Nonenergi

Penajaman subsidi pupuk melalui penyempurnaan data petani e-RDCK penerima subsidi dengan basis data NIK dan alamat (*by name by address*).

Efisiensi HPP dan perubahan komposisi pupuk NPK sebagai langkah efisiensi anggaran.

Insentif perpajakan melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP)

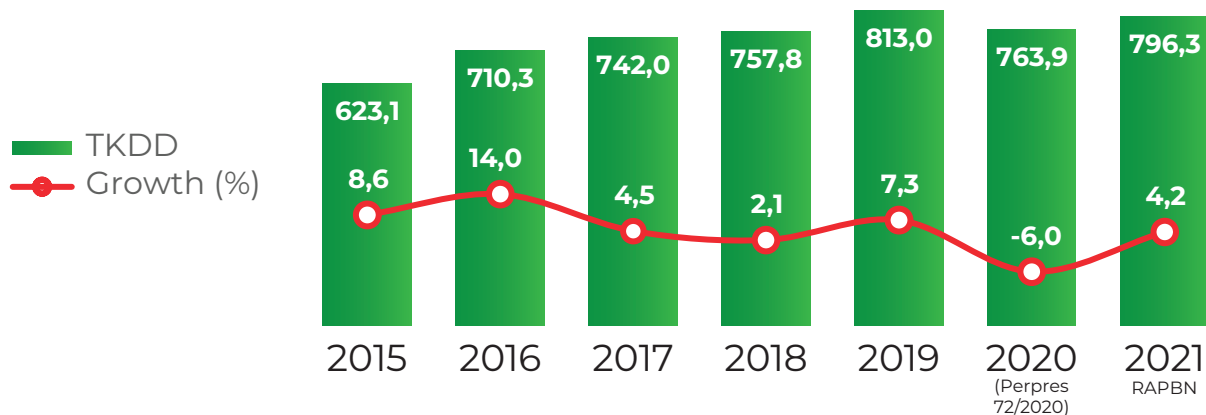
Mendukung peningkatan pelayanan umum bidang transportasi publik dan penyediaan informasi publik

Plafon KUR naik dari Rp190 T (2020) menjadi Rp220 T (2021)



Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peningkatan *quality control* TKDD dan mendorong peningkatan peran pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan



Dukungan TKDD untuk Program Prioritas

Pengembangan UMKM

Dukungan pembangunan dan revitalisasi sentra IKM, serta pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan UMKM dan BUMDes

Reformasi Pendidikan dan Kesehatan

- o Dukungan perbaikan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan berdasarkan target "ketuntasan intervensi" dalam mendukung program merdeka belajar
- o Dukungan peningkatan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana dan alkes Fasyankes di daerah dan desa

Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani/Nelayan

Peningkatan dan pemberdayaan usaha pertanian/ perikanan, yang didukung penyediaan akses jalan dan konservasi sumber air

Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas

Dukungan untuk peningkatan akses dan konektivitas darat maupun air dalam rangka pemulihan ekonomi

Pengembangan Pariwisata

Dukungan penyediaan sarana, amenitas, akses jalan pariwisata dan pengembangan Desa Wisata, yang diikuti pemberian insentif perpajakan, peningkatan kualitas tata kelola destinasi wisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata

Pembangunan ICT

Dukungan digitalisasi pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan desa digital

Arah Kebijakan

- Mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui:
 - Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi.
 - Dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.
- Mensinergikan TKDD dan Belanja K/L dalam pembangunan human capital (Pendidikan dan Kesehatan).
- Mendorong belanja Infrastruktur daerah melalui *creative financing* seperti pinjaman daerah, KPBU daerah, serta kerjasama antardaerah untuk mendukung pencapaian target RPJMN.
- Redesain pengelolaan TKDD, terutama DTU dan DTK dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas.
- Meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan Penyusunan Bagan Akun Standar (BAS).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Rencana Pencapaian DAK Fisik

*Angka Output masih sementara



PENDIDIKAN

- Peningkatan sarana dan prasarana **23.016 unit**
- Pembangunan **34 unit** dan Rehabilitasi **36 unit** Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum



KESEHATAN

- Pembangunan **971 Gedung Puskesmas**
- Pembangunan/Rehabilitasi **559 RS Rujukan**
- Penguatan Intervensi stunting di **360 kab/kota**



LHK

- Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah **17 unit**
- Penanaman Hutan Rakyat **16.750 Hektar**



TRANSPORTASI PERAIRAN

- Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan **60 Pelabuhan**
- Pembangunan Bus Air **10 Unit** dan Bus Air Roro **10 Unit**



PARIWISATA

- Pembangunan amenitas kawasan pariwisata dan Pembangunan Atraksi daya tarik wisata di **154 daerah**



AIR MINUM

- Pembangunan SPAM JP **167.110 SR**
- Perluasan SPAM JP **117.097 SR**



JALAN

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan **2.375 KM**
- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan **10.076 KM**
- Pembangunan Jalan **229 KM**
- Pembangunan Jembatan **699 M**



SANITASI

- Pengembangan dan Pembangunan **33.975 SR** Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala Permukiman dan **465 SR** skala Perkotaan



KELAUTAN & PERIKANAN

- Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengadaan Sarpras Pelabuhan Perikanan di **111 Pelabuhan Perikanan**
- Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan Prov/Kab/Kota **255 Unit**



PERUMAHAN & PEMUKIMAN

- Peningkatan kualitas rumah **40.000 Unit**
- Pembangunan baru rumah layak huni **10.000 Unit**



IRIGASI

- Rehabilitasi jaringan irigasi **335.584 Ha**
- Pembangunan jaringan irigasi **41.488 Ha**



IKM

- Pembangunan Sentra IKM **20 Sentra**
- Revitalisasi Sentra IKM **100 Sentra**



TRANSPORTASI PEDESAAN

- Pembangunan dan Peningkatan Jalan Pedesaan strategis **1.769 KM**
- Pengadaan Sarana Transportasi Perairan dibawah 20 GT sebanyak **585 unit**

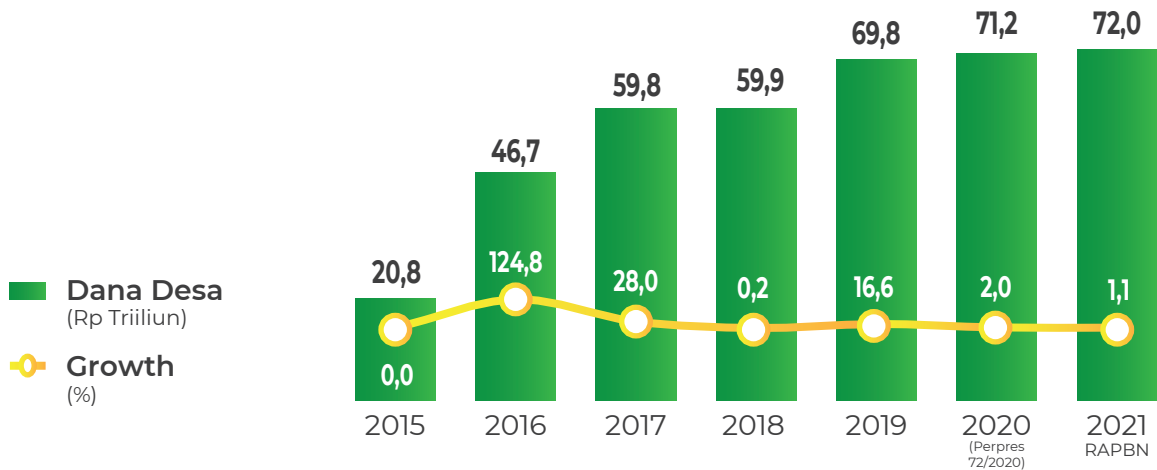


PERTANIAN

- Pembangunan **3.355 unit** sumber air
- Pembangunan **1.000 km** jalan usaha tani/jalan produksi

Dana Desa

Meningkatkan kinerja pelaksanaan dana desa serta mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas



Arah Kebijakan

Reformulasi Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa

- Meningkatkan porsi alokasi formula, guna memperbaiki proporsi alokasi dana desa per desa sesuai karakteristik desa.
- Penguatan alokasi kinerja untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan transformasi perekonomian desa.

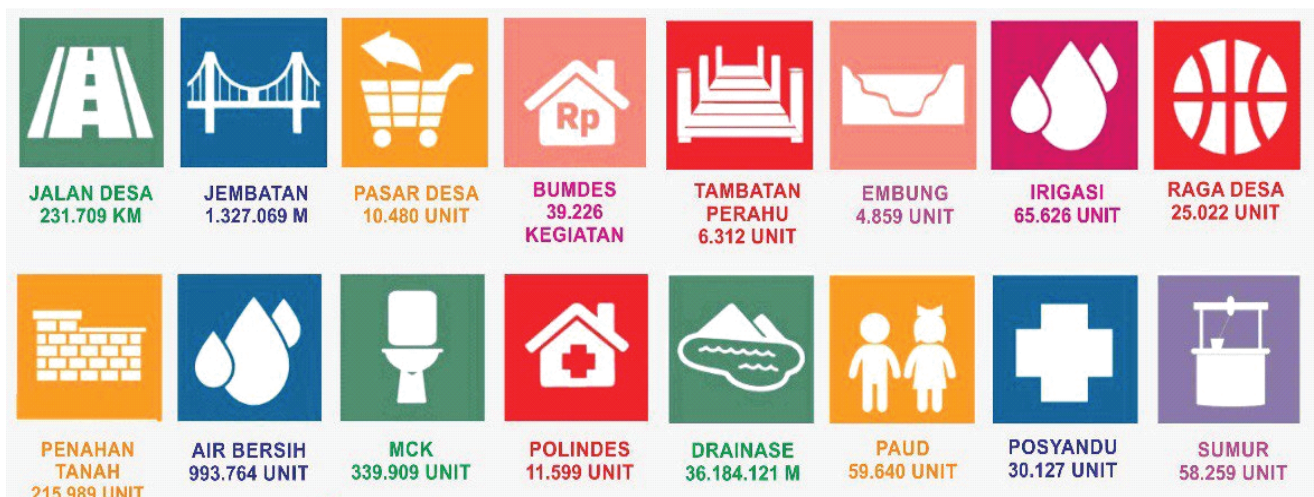
Fokus untuk Pemulihan Perekonomian Desa

- Memperkuat kesinambungan program padat karya tunai.
- Memberdayakan UKM dan sektor usaha pertanian.
- Mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital

Mendukung Pengembangan Sektor Prioritas

- Mendukung program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui pengembangan desa digital.
- Mendukung program pengembangan pariwisata melalui pembangunan desa wisata.
- Mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, peternakan dan perikanan.

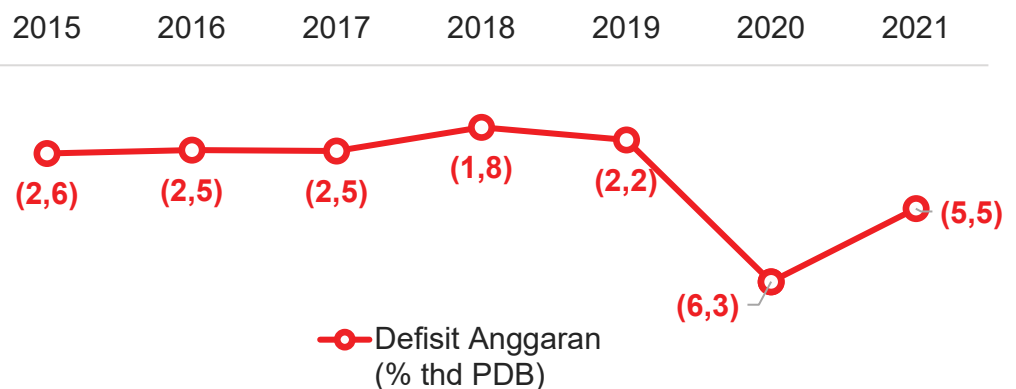
CAPAIAN OUTPUT DANA DESA 2015-2019



Pembiayaan Anggaran

Mendorong pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk mendukung kebijakan ekspansif konsolidatif

Defisit (% terhadap PDB)



Kebijakan Pembiayaan

Pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk mendukung *countercyclical* stabilisasi ekonomi (a.l. penguatan KPBU, SWF, SAL, BLU, dan fleksibilitas pinjaman tunai)

Mendukung restrukturisasi BUMN, BLU, SWF untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pencapaian target;

Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM, UMI dan perumahan bagi MBR;

Mendorong pendalaman pasar dan efisiensi *cost of borrowing*, (perluasan basis investor/kanal pembayaran SBN ritel serta mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah)

Efektivitas kuasi fiskal untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya saing SDM serta peningkatan ekspor.

Arah Kebijakan Utang

Fleksibel dengan kehati-hatian --> fleksibilitas pembiayaan utang yang responsif terhadap kondisi pasar keuangan namun tetap menjaga rasio utang dalam batas yang aman; Peningkatan *outstanding* dan *debt to GDP ratio* dikarenakan kebutuhan pembiayaan yang meningkat di tengah tekanan resesi ekonomi global dan dukungan untuk mengatasi pandemi Covid-19

Efisiensi Biaya Utang --> Pendalaman pasar (perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar SBN, diversifikasi pembiayaan utang a.l. penerbitan SDG *bonds* dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah)

Keseimbangan --> menjaga komposisi portofolio optimal untuk menjaga keseimbangan makro.

Pembiayaan Investasi

SDM Berkualitas

Peningkatan produktivitas/daya saing SDM
Menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi.

Anggaran Pendidikan
Melalui Pembiayaan

Rp51,0 T

Penguatan kelembagaan UMKM, UMi, Asuransi & Penjaminan

Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Sektor UMi
Peningkatan akurasi data dan perbaikan penyaluran,
Memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perseroan

Dukungan Kelembagaan
dan Pemberdayaan

Rp22,0 T

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur

Meningkatkan daya saing investasi dan ekspor
Pembangunan infrastruktur sarpras transportasi, pemukiman dan infrastruktur ketahanan energi

Anggaran
Infrastruktur

Rp45,1 T

Meningkatkan Peran Serta Indonesia Di Dunia Internasional

Mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam organisasi Lembaga Keuangan Internasional

Anggaran Peran serta
Indonesia di Dunia
Internasional

Rp2,9 T

Mendorong Program Ekspor Nasional

Mendukung industri barang/jasa yang berorientasi ekspor
Penguatan daya saing barang/jasa dalam negeri di pasar internasional

Anggaran Program
Ekspor Nasional

Rp5,0 T





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Jalan Dr Wahidin Raya No. 1
Gedung Sutikno Slamet Lt.12
www.anggaran.kemenkeu.go.id

